

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada masa orde baru, hasil-hasil pembangunan lebih terkonsentrasi di pulau jawa, sehingga pulau jawa menjadi lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, pada akhirnya timbul ketimpangan struktur ekonomi yang mencolok antar wilayah di Indonesia. Daerah yang relatif kaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah yang relatif miskin khususnya kawasan timur Indonesia (Rosmeli & Nurhayani, 2014).

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran setiap negara perlu meningkatkan pembangunan ekonomi didalamnya. Masalah besar yang pasti terjadi dan dihadapi setiap negara berkembang termasuk Indonesia ini dalam distribusi pendapatannya adalah kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Hal ini terjadi pada masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bukan hanya negara berkembang, negara maju juga menghadapi masalah ketimpangan ekonomi ini namun proporsi besar kecilnya ketimpangan yang ditemui adalah perbedaannya dan tingkat kesulitan mengatasi juga ditentukan oleh jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Terjadinya pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah guna mencapai tujuan dalam meningkatkan distribusi pendapatan, Suryono (2010) menyatakan bahwa pendapatan perkapita suatu penduduk meningkat dalam waktu yang panjang adalah pembangunan ekonomi. Menurut Todaro & Smith (2013) untuk mengevaluasi distribusi pendapatan dapat dimulai dari 2 ukuran produk yakni distribusi fungsional dan distribusi pendapatan pribadi yang dapat mempertimbangkan pribadi sebagai totalitas yang berbeda. Dimana penduduk menerima pendapatan sebesar 40 persen, penduduk yang mempunyai penghasilan paling rendah 40 persen, dan penduduk yang mendapatkan penghasilan paling tinggi sebesar 20 persen.

Perbedaan penghasilan antara masyarakat ataupun daerah maju dengan daerah tertinggal merupakan akar permasalahan yang dikenal dengan istilah ketimpangan distribusi pendapatan. Kian besarnya disparitas pendapatan alhasil kian besarnya pula keberagaman distribusi pendapatan, yang selanjutnya nantinya berkontribusi terhadap adanya kesenjangan ekonomi. Hal ini tidak dapat dicegah karena terdapat *trickle-down effect* yang terjadi ketika output terdistribusi secara menyeluruh. Hanya sedikit kelompok minoritas yang dapat memperoleh manfaat dari hasil produksi nasional, dan kelompok tersebut mempunyai tujuan tertentu. (Musfidar, 2012).

Beberapa metode umum untuk mengukur ketimpangan meliputi *Gini Ratio*, *Theil Index*, dan ukuran ketimpangan yang diterapkan oleh Bank Dunia. Dalam penelitian ini, Gini Ratio dipilih sebagai indikator ketimpangan. Gini Ratio yakni salah satu alat yang paling kerap dipergunakan dalam mengevaluasi ketimpangan, dengan nilai yang berkisar dari nol hingga satu, merepresentasikan tingkat ketimpangan agregat. Indeks Gini mencakup kesenjangan individu dan kolektif. Nilai nol pada Indeks Gini menunjukkan tidak adanya ketimpangan (kesetaraan sempurna), sedangkan nilai satu menunjukkan adanya disparitas sempurna.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi derajat kesenjangan yang ada di suatu tempat, dan salah satu upaya tersebut adalah dengan pertumbuhan perekonomian. Di sisi lain, ketimpangan tidak bisa dihilangkan seluruhnya; sebaliknya, jumlah tersebut hanya mampu dikurangi pada tingkatan tertentu dalam sistem sosial untuk menjamin adanya keselarasan pada proses penambahan penduduk. Dapat dipastikan bahwa ketimpangan akan terus terjadi baik di negara-negara berkembang ataupun negara maju. Perbedaannya terletak pada besarnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada, serta besarnya ketimpangan yang akan dialami.

Akibat dari proses pembangunan yang mana ialah tahapan perubahan pada pembangunan itu sendiri, kesenjangan di suatu daerah merupakan akibat dari proses pembangunan tersebut. Kesenjangan pendapatan merupakan masalah penting lainnya yang harus diatasi agar suatu negara dapat mencapai kemajuan dalam pembangunannya. Hal ini terkait dengan distribusi uang yang diperoleh

individu dalam suatu negara, dan inilah yang disebut dengan ketidakadilan pendapatan. Penyebaran pendapatan di dalam komunitas menjadi semakin tidak seimbang saat tingkat perbedaan pendapatan semakin meningkat. Kesenjangan keseluruhan antara individu yang mempunyai tingkatan ekonomi relatif tinggi (kelompok kaya) dan individu yang berpenghasilan rendah (kelompok miskin) pada akhirnya akan semakin besar sebagai akibat dari keadaan ini.

Ketimpangan distribusi pendapatan dianalisis menggunakan metode indeks Gini, yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Kian besarnya nilai indeks Gini, semakin tinggi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Sebaliknya, nilai indeks Gini yang lebih kecil mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Delapan faktor penting yang menyebabkan ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan di negara-negara yang sedang berkembang, yang menjadi penyebab utama ketidakseimbangan dalam pembagian hasil ekonomi di wilayah tersebut:

1. Ekspansi populasi yang cepat, yang menyebabkan penurunan jumlah uang yang diperoleh setiap individu.
2. Inflasi, terjadi bilamana jumlah uang yang beredar meningkat namun tidak diiringi dengan peningkatan jumlah barang yang diproduksi sebanding.
3. Pertumbuhan yang tidak merata antar wilayah.
4. Investasi yang sangat besar pada proyek-proyek yang memerlukan modal dalam jumlah besar, yang menyebabkan tingginya proporsi pendapatan yang berasal dari peningkatan modal kerja dibandingkan dengan proporsi pendapatan yang bersumber dari tenaga kerja, yang pada gilirannya mengakibatkan kenaikan tarif.
5. Rendahnya mobilitas sosial menjadi faktor kelima.
6. Penerapan strategi industri yang menjadikan kenaikan harga produk industri dalam melindungi perusahaan-perusahaan kelas kapitalis memerlukan penerapan kebijakan industri substitusi impor.

7. Memburuknya nilai tukar mata uang negara berkembang pada perdagangan dengan negara maju, sebagai dampak dari inelastisitas permintaan komoditas ekspor NSB yang diungkapkan negara maju
8. Kegagalan usaha kerajinan rakyat sebagai contohnya pertukangan, industri rumah tangga, dan usaha lain yang sejenis.

Gini Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Pada periode Maret 2020 dan Maret 2021. Provinsi Jambi mengalami sedikit kenaikan Gini Ratio dari 0,320 menjadi 0,321. Kondisi di daerah perkotaan maupun perdesaan hampir sama artinya pada periode Maret 2020 – Maret 2021 ketimpangan pendapatan penduduk baik di daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami sedikit perubahan kenaikan.

Gini Ratio merupakan indikator ketimpangan pendapatan yang umum digunakan. Di Provinsi Jambi, Gini Ratio sedikit meningkat dari 0,320 pada Maret 2020 menjadi 0,321 pada Maret 2021, dengan pola serupa di perkotaan dan pedesaan. Selama 2019-2021, Gini Ratio di kabupaten/kota Jambi rata-rata berada di angka 0,30, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,36. Ketimpangan pendapatan ini diperkirakan dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.

Wilayah Provinsi Jambi mencakup 11 kabupaten/kota dan berdasarkan posisi kewilayahan yang telah dijelaskan dari website [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id) (Pemerintah Provinsi Jambi, 2023) yang terdiri dari lima provinsi atau kota berbeda yang berlokasi di wilayah timur provinsi Jambi, yakni: Wilayah barat Provinsi Jambi mencakup enam kabupaten/kota, yaitu Sarolangun, Bungo, Tebo, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Daerah ini memiliki lahan pertanian dan perkebunan luas, didukung oleh fasilitas produksi kecil hingga menengah, yang secara signifikan menyumbang pada PDRB Provinsi Jambi. Sebagai perbandingan, wilayah timur hanya terdiri dari lima kabupaten/kota, termasuk Kota Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan

Muaro Jambi. Perbedaan jumlah wilayah dan karakteristik ekonomi ini menciptakan kesenjangan antara wilayah barat dan timur Jambi.

**Tabel 1.1**

**Ketimpangan Pendapatan provinsi Jambi wilayah Barat dan Provinsi Jambi  
Wilayah Timur Tahun 2020-2021**

Wilayah Bagian	Kabupaten/Kota	Ketimpangan Pendapatan	
		2020	2021
Jambi Wilayah Barat	Kerinci	0,28	0,28
	Merangin	0,32	0,29
	Sarolangun	0,31	0,32
	Tebo	0,3	0,3
	Bungo	0,31	0,3
	Sungai Penuh	0,31	0,31
	<b>Rata-Rata</b>	<b>0,31</b>	<b>0,30</b>
Jambi Wilayah Timur	Batanghari	0,32	0,31
	Muaro Jambi	0,28	0,32
	Tanjab Timur	0,25	0,25
	Tanjab Barat	0,2	0,25
	Kota Jambi	0,34	0,35
	<b>Rata-Rata</b>	<b>0,29</b>	<b>0,30</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Melalui tabel 1.1 nampak bahwasanya terdapat perbedaan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio pada Provinsi Jambi wilayah Timur dan Provinsi Jambi wilayah Barat. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jambi wilayah Timur memiliki Gini Rasio yang lebih baik dibanding Provinsi Jambi wilayah Barat pada tahun 2020.

Jika dilihat secara rata-rata bahwa tidak ada perbedaan yang jauh antar Provinsi Jambi wilayah timur dengan barat. Namun jika dilihat dari setiap

wilayah kabupaten/kotanya terdapat fenomena dimana pada tahun 2020 angka ketimpangan pendapatan yang dilihat dari rasio gini pada wilayah Jambi Wilayah Barat lebih besar dibanding Jambi Wilayah Timur. Pada Jambi Wilayah Barat hanya 1 wilayah yang memiliki angka ketimpangan pendapatan di bawah 0,30 yaitu Kabupaten Kerinci. Namun untuk Jambi Wilayah Timur walaupun memiliki 3 wilayah dengan angka rasio gini dibawah 0,30, akan tetapi Kota Jambi memiliki rasio gini terbesar yaitu 0,34. Hal ini menunjukkan bahwa Baik Provinsi Jambi wilayah Barat maupun wilayah Timur masing-masing tetap memiliki permasalahan ketimpangan pendapatan yang harusnya dapat dikurangi.

Menurut latar belakang tersebut maka peneliti berminat dalam mengangkat judul **“Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jambi Wilayah Barat dan Timur”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Ketimpangan distribusi pendapatan akibat tidak meratanya pelaksanaan pembangunan di berbagai lapisan masyarakat dan wilayah akan menyebabkan semakin besarnya disparitas perekonomian. Ketimpangan ekonomi dapat kita lihat dengan mengamati semakin besarnya kesenjangan distribusi pendapatan di berbagai lapisan masyarakat dan wilayah. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan oleh semakin besarnya kesenjangan distribusi pendapatan adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Berdasarkan gagasan yang dikemukakan di atas, hanya karena tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti adanya keberhasilan dalam pembagian keuntungan. Berdasarkan informasi ini, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan tenaga kerja, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di wilayah barat dan timur Provinsi Jambi?
2. Bagaimana tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah barat dan timur Provinsi Jambi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan tenaga kerja, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di wilayah barat dan timur Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah barat dan timur Provinsi Jambi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademisi

Hasil penelitian ini, yang menghubungkan pemahaman teoritis dari bangku kuliah dengan situasi nyata, dapat menjadi referensi sekaligus perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu serupa, khususnya terkait ketimpangan pendapatan.

2. Manfaat praktisi,

Temuan dari penelitian ini harapannya mampu berkontribusi atau masukan untuk pemerintah mengenai ketimpangan distribusi pendapatan antara wilayah barat dan timur di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi agar dapat mencari tahu keadaan perekonomian yang sedang berjalan.

